

**ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN OPERASI PT TOBA PULP LESTARI DI  
WILAYAH HUTAN TANAM INDUSTRI MASYARAKAT ADAT PARGAMANAN  
BINTANG MARIA KECAMATAN PARLILITAN KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN**

**Eflin Efridonda Simbolon<sup>1</sup>, Artha Tobing<sup>2</sup>, Dimpos Manalu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: eflin.efridonda@student.uhn.ac.id

Email: dimpos.manalu@uhn.ac.id; maringan.panjaitan@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

Forest resource management in Indonesia is an important part of sustainable development policy aimed at balancing economic growth, environmental sustainability, and community welfare. One form of forest utilization is through the Industrial Plantation Forest (HTI) scheme. However, in practice, HTI activities often generate various environmental and social impacts on communities living around forest areas. PT Toba Pulp Lestari is one of the companies managing Industrial Plantation Forests in Humbang Hasundutan Regency, including within the customary territory of the Pargamanan Bintang Maria Indigenous community in Parlilitan District. This study aims to analyze the environmental impacts of the company's operations and to understand community perceptions of the environmental changes that have occurred. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with key informants, including the leader of the indigenous community, community members directly affected by the company's activities, and additional informants such as village government representatives and the company. Documentation studies were also used to support the data. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the operations of PT Toba Pulp Lestari have caused various environmental changes, including a reduction in natural forest cover, decreased water availability, and disruption of ecosystem balance, which has affected the productivity of benzoin forests as the main livelihood source of the community. In addition, the community has experienced social and economic changes, such as shifts in livelihood patterns, reduced agricultural and forest yields, and differing views within the community regarding the presence of the company. Although the company provides employment opportunities for some community members, the economic benefits remain limited. The conclusion of this study shows that the operational activities of PT Toba Pulp Lestari have significant impacts on the environment and the livelihoods of the Pargamanan Bintang Maria Indigenous community. Therefore, more sustainable forest management is required by considering environmental conservation, protection of indigenous peoples' rights, and stronger government supervision to create a balance between economic development and environmental sustainability.

**Keywords:** Environmental impact, Industrial plantation forest, PT Toba Pulp Lestari.

**ABSTRAK**

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan adalah melalui skema Hutan Tanam Industri (HTI). Namun, dalam praktiknya aktivitas HTI sering menimbulkan berbagai dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar hutan. PT Toba Pulp Lestari merupakan salah satu perusahaan yang mengelola HTI di Kabupaten Humbang Hasundutan, termasuk di wilayah masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria, Kecamatan Parlilitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

181

Indexed



SINTA 4



dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan serta memahami persepsi masyarakat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan ketua komunitas masyarakat adat, masyarakat yang terdampak langsung, serta informan tambahan dari pemerintah desa dan pihak perusahaan, serta didukung oleh studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PT Toba Pulp Lestari menimbulkan berbagai perubahan lingkungan, seperti berkurangnya tutupan hutan alam, menurunnya ketersediaan sumber air, serta terganggunya ekosistem yang berdampak pada produktivitas hutan kemenyan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengalami perubahan sosial dan ekonomi, seperti perubahan pola mata pencaharian, berkurangnya hasil pertanian dan hasil hutan, serta munculnya perbedaan pandangan terhadap keberadaan perusahaan. Meskipun perusahaan membuka peluang kerja bagi sebagian masyarakat, manfaat ekonomi yang dirasakan masih terbatas. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas PT Toba Pulp Lestari memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat adat, serta pengawasan pemerintah yang lebih efektif agar tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan

**Kata kunci:** Dampak lingkungan, Hutan tanam industri, PT Toba Pulp Lestari.

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan publik yang diarahkan pada prinsip Pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Dalam praktiknya, pemerintah memberikab izin usaha pemanfaatan hutan kepada perusahaan melalui skema Hutan Tanam Industri (HTI). Setiap kegiatan tersebut secara normatif wajib melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pengendalian agar kegiatan usaha tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

Menurut Ronnawan Juniarmoko dkk. (2003), tujuan utama AMDAL adalah memastikan bahwa setiap rencana usaha kegiatan telah mempertimbangkan dampak lingkungan serta komprehensif sehingga keputusan yang diambil lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, secara ideal keberadaan HTI seharusnya memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak- hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat.

Salah satu perusahaan yang menjalankan usaha Hutan Tanam Industri di wilayah Sumatera Utara PT Toba Pulp Lestari. Dimana perusahaan ini beroperasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, termasuk di wilayah adat pargamanan Bintang maria, Kecamatan Parlilitan, Pada awal kehadiran PT TPL masyarakat adat pargamanan Bintang maria tidak tahu bahwa tanah adat mereka dilakukan operasi dari pihak TPL. (Siagian, R, 2025)

Menyatakan —pemberian hak atas tanah antar suku ini dilakukan dengan mekanisme adat dan disertai petuah bahwa tanah tersebut tidak boleh dipindahtangankan dan harus dijaga untuk generasi yang akan datang. Sebagian warga adalah petani yang menggantungkan hidupnya dari sawah, ladang dan tombak haminjon (hutan kemenyan). Saat musim tanam padi tiba, seluruh masyarakat Pargamanan-Bintang Maria akan menetap di kampung untuk bersamasama mengelola sawah. Pada musim manige (menyadap) getah kemenyan tiba, seluruh masyarakat serentak berangkat ke hutan dan menginap bermalam-malam di sana. Biasanya, masyarakat berangkat pada hari Selasa dan kembali ke kampung pada hari Sabtu.

Dampak yang diterima oleh masyarakat karena Pengalihan fungsi Hutan Alam dan Hutan Adat yang

sangat berketimpangan menjadi Hutan Industri, dilakukannya penanaman pohon eukaliptus yang bersifat fast growing species tentu memiliki daya serap air yang tinggi sehingga menyebabkan berkurangnya debit air, tanah, dan Sungai. Pada proses penanaman dan masa perkembangan pohon industri tersebut, masyarakat masih dapat menggunakan lahan mereka untuk melakukan kegiatan pertanian sederhana berupa intercrop (pertanian tumpang sari). Pertanian tumpang sari ini, dilakukan di bagian-bagian kosong atau selah pohon industri tersebut. Masyarakat bisa menggunakan lahan itu untuk menanam berbagai macam tanaman pertanian, seperti cabai, jagung, tomat, ubi, maupun tumbuhan muda lainnya. Bahkan perusahaan juga ikut dalam membantu mengembangkan pertanian intercrop masyarakat ini dengan cara memfasilitasi dan membantu menyediakan peralatan pertanian yang diperlukan. Bentuk pola kemitraan lainnya yang dijalin antara perusahaan dengan masyarakat yaitu masyarakat dapat ikut bekerja untuk perusahaan. Pekerjaan yang dimaksud baik menjadi kontraktor, mandor, operator maupun menjadi karyawan harian di Perusahaan tersebut. Hal ini ditujukan perusahaan untuk membantu meningkatkan keadaan sosial maupun ekonomi masyarakat yang ada di sekitar. Semua masyarakat yang berada di desa diperbolehkan ikut bekerja pada perusahaan untuk mendapatkan hubungan timbal balik yang baik antar masyarakat dengan perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa keberadaan Hutan Tanam Industri PT Toba Pulp Lestari sangat mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat mulai dari pekerjaan, pendapatan ekonomi karna mengikuti kegiatan Hutan Tanam Industri (SITUMORANG, S. 2020). Para petani kemenyan yang menyewakan lahannya kepada Toba Pulp Lestari merasa rugi. Mulai dari upah yang tidak sesuai, upah sering terlambat, merusak pohon kemenyan dan merusak hasil getah Lumberaja, F. D. N. (n.d.).

Jika dilihat dari perspektif kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Tomas Dye, Thomas R. (2013). Kebijakan publik adalah —segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pemberian izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH), persetujuan AMDAL, serta pengawasan terhadap operasional HTI merupakan bentuk konkret kebijakan publik yang menentukan bagaimana sumber daya hutan dikelola. Oleh karena itu, dampak lingkungan dan sosial yang muncul di wilayah konsensi TPL mencerminkan keberhasilan atau kegagalan negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan

Realitas yang terjadi di wilayah adat pargamanan Bintang maria menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan kehutanan dengan kondisi empiris di lapangan. Di satu sisi, kebijakan dirancang untuk mendorong Pembangunan dan kesejahteraan, disisi lain, munculnya kerusakan lingkungan, ketimpangan manfaat ekonomi, serta konflik. Ketegangan ini tentunya memicu aksi protes dari masyarakat adat pargamanan Bintang maria kepada pemerintah supaya tidak adanya lagi PT TPL di wilayah adat mereka.

Oleh karena itu, penelitian dilakukan karena ketertarikan penulis dengan adanya permasalahan yang ada antara PT.Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat pargamanan Bintang maria, yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, lingkungan, perusahaan. Maka tulisan ini akan menjawab bagaimana analisis dampak lingkungan operasi PT. Toba Pulp Lestari di wilayah HutanTanam Industri masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan”. Jika penelitian ini tidak diangkat maka kerusakan lingkungan akan terus berlanjut di wilayah adat pargamanan Bintang maria tanpa adanya sedikit pengelihat publik bagaimana perjuangan masyarakat adat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah adat mereka.

## METODE

Secara umum bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu kuantitatif dan kualitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori (theories) tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Oleh Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan memahami persepsi oleh individu atau kelompok dalam konteks permasalahan

lingkuan, sosial maupun kemanusiaan.

Menurut Sugiyono (2021:16) penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

## PEMBAHASAN

### Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Adalah instrument tentu sangat penting dalam manajemen dampak lingkungan karena berperan besar dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan. AMDAL sendiri dapat membantu memastikan proyek-proyek yang akan dilakukan harus memperhatikan setiap objek yang terlibat karena harus menjaga lingkungan dari kegiatan proyek tersebut.

Menurut otto soemarwoto (2005:38) AMDAL Adalah suatu proses kajian yang dilakukan untuk menilai dampak besar dan signifikan yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan kegiatan terhadap lingkungan hidup. Agar Pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak merusak keseimbangan di lingkungan. AMDAL berperan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan Pembangunan mempertimbangkan dampak besar dan signifikan terhadap lingkungan hidup, sehingga pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan.

Tujuan utama dari amdal Adalah untuk memberikan Gambaran lengkap mengenai dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu kegiatan, serta menyediakan rekomendasi Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan dampak tersebut.

Menurut Otto Soemarwoto (2005: 35) AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi dampak besar dan menjadi dasar pengambilan keputusan, serta menjamin agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

- a. Mengidentifikasi serta memperkirakan dampak besar dan penting yang mungkin timbul akibat suatu rencana usaha dan kegiatan terhadap lingkungan hidup.
- b. Menjadi dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan suatu rencana kegiatan, sehingga kebijakan pembangunan yang diambil tidak merugikan lingkungan.
- c. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan melalui upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- d. Menjamin keberlanjutan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.
- e. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan, untuk memasukkan pertimbangan lingkungan hidup ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, sehingga kegiatan ekonomi dan sosial tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem.

AMDAL menjadi instrument penting yang berfungsi sebagai alat pengendalian lingkungan dalam proses Pembangunan. AMDAL tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan agar kegiatan Pembangunan tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga pelaksanaan Pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan

### Pengelolaan Hutan Tanam Industri

Pengembangan Hutan Tanam Industri dilatarbelakangi oleh kondisi kesenjangan antara kapasitas industri per kayu dengan pasokan bahan kayu yang pada waktunya itu hanya mengandalkan kayu dari

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

184

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



hutan alam. Jenis tanaman Hutan Tanam Industri yang dibudidayakan pada umumnya jenis kayu cepat tumbuh akasia, sengon, ecaliptus, gmelin dsb, (Industrial Forest Plantation, 2024). Menurut Hasanu Simon (2004:15), pengelolaan hutan Bersama masyarakat merupakan suatu pendekatan pengelolaan hutan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan dalam keseluruhan proses pengelolaan sumber daya hutan. Pandangan simon, menganggap bahwa hutan tidak dapat dikelola secara efektif apabila masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan diposisikan hanya sebagai objek kebijakan. Sebaliknya, masyarakat harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal, kepentingan langsung, serta ketergantungan sosial dan ekonomi terhadap hutan, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengawasan, guna mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan

## Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Lingkungan

Menurut Harsono Boedi (2013) hak ulayat sebagai hak penguasaan yang dimiliki secara Bersama oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat terhadap wilayah tertentu yang menjadi tempat hidup dan sumber penghidupan mereka. Hak ulayat bukan sekadar hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah, melainkan hubungan yang bersifat komunal, turun-temurun, dan berlandaskan nilai sosial serta budaya. Hubungan tersebut mencerminkan keterikatan yang kuat antara masyarakat adat dengan wilayahnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun spiritual.

Dalam perspektif Boedi Harsono, hak ulayat tidak dapat disamakan dengan hak milik individual sebagaimana dikenal dalam hukum perdata modern. Hak ulayat bersifat kolektif dan tidak dapat dipindahtangankan secara bebas kepada pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat. Tanah ulayat dipandang sebagai bagian dari kehidupan bersama yang harus dijaga keberlanjutannya, sehingga pemanfaatannya selalu dibatasi oleh norma adat dan kepentingan kolektif masyarakat.

Menurut Boedi Harsono menegaskan bahwa hak ulayat memperoleh pengakuan dalam sistem hukum agraria nasional melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA tidak menghapus hukum adat, tetapi justru menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum agraria nasional. Dengan demikian, hukum adat dan hak ulayat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, yaitu selama hak ulayat masih hidup dan nyata dijalankan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Artinya, keberadaan hak ulayat harus dapat dibuktikan melalui praktik sosial, struktur kelembagaan adat, dan penguasaan wilayah secara faktual. Konsep ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh serta-merta mengabaikan hak ulayat, melainkan wajib melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

## Aktivitas Operasi PT Toba Pulp Lestari di Wilayah Hutan Tanam Industri Masyarakat Adat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan Tokoh adat, anggota KSPPM/masyarakat adat, serta pemerintah desa, diketahui bahwa aktivitas operasional PT Toba Pulp Lestari di wilayah Hutan Tanam Industri (HTI) Pargamanan Bintang Maria telah berlangsung sejak awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2002–2003. Aktivitas tersebut dimulai setelah wilayah adat masyarakat ditetapkan sebagai bagian dari konsesi perusahaan oleh pemerintah. Sejak saat itu, berbagai kegiatan operasional perusahaan mulai terlihat secara nyata di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pembukaan lahan dan pengelolaan hutan menjadi kawasan industri.

Salah satu bentuk utama aktivitas operasional perusahaan adalah pembukaan lahan dalam skala luas. Informan menyampaikan bahwa kawasan hutan alam yang sebelumnya menjadi wilayah kelola masyarakat adat mulai dibuka untuk kepentingan industri. Perubahan ini tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga menggeser fungsi hutan dari sistem alami menjadi sistem produksi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan Utama:

“Bagi kami, keberadaan hutan kemenyan bukan sekedar komoditas ekonomi, tetapi bagian sistem

kehidupan yang menyatu dengan hutan alam. Ketika kawasan tersebut terganggu, maka bukan hanya ekonomi masyarakat yang terdampak, tetapi juga keseimbangan ekologis dari warisan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun.” (Wawancara Eva Junita Lumban Gaol, Pargamanan Bintang Maria, 15 Februari 2025).

Kegiatan pembukaan lahan tersebut kemudian diikuti dengan penanaman tanaman industri, khususnya jenis eucalyptus, sebagai komoditas utama perusahaan. Penanaman dilakukan dengan sistem monokultur, yaitu hanya menanam satu jenis tanaman dalam satu kawasan. Sistem ini berbeda dengan kondisi sebelumnya yang didominasi oleh hutan alam dengan keanekaragaman jenis tanaman. Informan Tambahan menjelaskan bahwa perubahan vegetasi ini berdampak pada struktur ekosistem hutan yang ada.

“Setelah adanya PT TPL beroperasi dengan sistem HTI, terjadi perubahan pada tutupan hutan. Sebagian Kawasan hutan alam ditebang dan kemudian ditanami dengan tanaman industri seperti eucalyptus, perubahan ini berdampak pada kondisi lingkungan secara keseluruhan”. (Wawancara Lamser Munthe, Desa Simataniari, 12 Februari 2026).

Selain penanaman, aktivitas operasional perusahaan juga mencakup penggunaan alat berat dalam proses pengolahan lahan dan pemanenan. Penggunaan alat berat tersebut dinilai menjadi bagian dari sistem produksi industri yang berorientasi pada efisiensi dan hasil. Namun demikian, masyarakat melihat bahwa aktivitas ini turut memengaruhi kondisi fisik tanah di wilayah tersebut.

“Pola penanaman tanaman industri seperti eucalyptus dilakukan dalam siklus yang relatif singkat, kemudian dipanen menggunakan alat berat yang menggemburkan tanah. Ketika musim hujan tiba, kondisi tanah yang telah terbuka dan terganggu menjadi lebih rentan terhadap erosi dan longsor. Hal ini berbeda dengan pohon kemenyan yang membutuhkan waktu dan perawatan, tetapi mampu bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun serta menjaga struktur tanah dan keseimbangan ekosistem”. (Wawancara Rajes Sitanggang, Pargamanan Bintang Maria, 15 Februari 2026).

Di samping itu, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, perusahaan juga menggunakan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk. Penggunaan bahan tersebut merupakan bagian dari sistem pengelolaan tanam industri untuk menjaga produktivitas yang disalurkan melalui kelompok tani hutan.

Melalui kelompok tani hutan, kami mendapat dukungan untuk pertanaman cabai, mulai dari penyediaan kompos, pupuk kimia, obat-obatan pertanian, hingga pendampingan perawatan sampai masa panen. Bantuan tersebut cukup membantu dalam menunjang kegiatan pertanian kami. Selain itu, dalam program penanaman kemenyan, setiap anggota kelompok tani hutan (sekitar 20 kepala keluarga) menerima kurang lebih 200 batang bibit kemenyan. (Wawancara dengan masyarakat sekaligus bagian kelompok Tani Hutan, Desa Simataniari, 12 februari 2026).

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan masyarakat dalam pola kemitraan tersebut lebih banyak berada pada tahap pelaksanaan, bukan pada proses perencanaan kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Beberapa informan menyatakan bahwa pembentukan kelompok dan program kemitraan dilakukan setelah aktivitas perusahaan berjalan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan partisipasi masyarakat sejak awal.

“Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk kelompok tani hutan dengan alasan pemberdayaan hutan kemenyan. Kelompok-kelompok tersebut kemudian difasilitasi, misalnya melalui bantuan bibit kemenyan. Namun, kami sendiri tidak mengetahui secara pasti di mana dan bagaimana bibit tersebut ditanam dan dikelola”. (Wawancara Eva Junita Lumban Gaol, Pargamanan Bintang Maria, 15 Februari, 2026).

Dari sisi ketenagakerjaan, keberadaan PT Toba Pulp Lestari juga memberikan peluang kerja dan manfaat ekonomi tertentu bagi masyarakat. Beberapa masyarakat memperoleh bantuan melalui program pertanian, pembangunan infrastruktur desa, serta beasiswa pendidikan. Meskipun demikian, manfaat tersebut dirasakan belum merata oleh seluruh masyarakat dan masih terbatas pada kelompok tertentu.

“Salah satu bentuknya adalah adanya dukungan perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur

desa, seperti bantuan dana untuk pembangunan jembatan dan pembuatan saluran drainase (gorong-gorong). (Wawancara Rajes Sitanggang, Desa Simataniari, 12 Februari 2026).

Secara keseluruhan, aktivitas operasional PT Toba Pulp Lestari di wilayah HTI Pargamanan Bintang Maria mencakup pembukaan lahan, penanaman tanaman industri dengan sistem monokultur, penggunaan teknologi dan bahan kimia, serta pelaksanaan program kemitraan dengan masyarakat. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan hutan dari sistem tradisional berbasis kearifan lokal menuju sistem industri yang berorientasi pada produksi, yang kemudian berdampak pada kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Persepsi Dan Pengalaman Langsung Masyarakat Adat Pargamanan Bintang Maria, Mengenai Perubahan Lingkungan Akibat Adanya Oprasi PT Toba Pulp Lestari

Persepsi masyarakat adat Pargamanan–Bintang Maria terhadap perubahan lingkungan akibat operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) cenderung bersifat negatif, yang terbentuk dari pengalaman langsung mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat merasakan adanya perubahan signifikan pada kondisi lingkungan, terutama terkait kerusakan hutan kemenyan (tombak haminjon), menurunnya kualitas tanah, serta berkurangnya ketersediaan sumber air.

Hutan kemenyan yang sebelumnya menjadi ruang hidup sekaligus sumber utama penghidupan masyarakat mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan dan konversi menjadi hutan tanaman industri, sehingga berdampak langsung pada menurunnya hasil produksi kemenyan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa masyarakat “merasakan langsung dampak kerusakan hutan terhadap menurunnya hasil kemenyan dan berkurangnya sumber air” (Mongabay, 2022).

Selain itu, perubahan ekosistem hutan akibat aktivitas industri turut memengaruhi keseimbangan lingkungan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat. Berkurangnya tutupan hutan dan terganggunya siklus air menyebabkan penurunan debit sungai serta perubahan kondisi iklim mikro yang berdampak pada produktivitas tanaman kemenyan. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi dan budaya mereka. Sebagaimana dijelaskan bahwa perubahan ekosistem hutan berdampak pada menurunnya produktivitas hasil hutan non-kayu, termasuk kemenyan (KSPPM, 2022).

Pengalaman langsung tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarkan aspirasi dan menuntut respons pemerintah terhadap kondisi yang mereka hadapi. Namun demikian, masyarakat menilai bahwa respons pemerintah masih belum optimal dalam menangani dampak lingkungan yang terjadi, sehingga menimbulkan persepsi adanya ketimpangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan industri. Dalam hal ini, masyarakat adat masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan atas wilayah adat mereka (KSPPM, 2022). Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya mengandalkan jalur formal, tetapi juga melakukan berbagai upaya seperti penyampaian aspirasi secara langsung, aksi protes, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat posisi mereka dalam advokasi lingkungan.

Dengan demikian, persepsi dan pengalaman langsung masyarakat adat Pargamanan–Bintang Maria menunjukkan bahwa dampak operasional PT TPL tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga memengaruhi aspek ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Pengalaman tersebut membentuk kesadaran kolektif masyarakat untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan serta hak atas wilayah adat mereka, sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan hutan sebagai penopang utama kehidupan masyarakat lokal.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, keberadaan PT Toba Pulp Lestari juga mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adat di wilayah penelitian. Sebelum adanya aktivitas perusahaan di kawasan tersebut, sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian serta pemanfaatan hasil hutan. Salah satu komoditas utama yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adalah kemenyan. Tanaman kemenyan telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat dan dikelola secara turun-temurun sebagai sumber pendapatan keluarga. Kegiatan pengelolaan kemenyan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya karena telah menjadi

bagian dari tradisi masyarakat dalam memanfaatkan hutan secara berkelanjutan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, kondisi tersebut mulai mengalami perubahan setelah aktivitas perusahaan berjalan di wilayah tersebut. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa hasil kemenyan yang mereka peroleh tidak lagi sebanyak sebelumnya. Hal ini diduga berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kemenyan. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang menyampaikan bahwa sebagian lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun pengelolaan kemenyan kini tidak lagi dapat digunakan seperti sebelumnya. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Perubahan kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri yang berada di sekitar wilayah masyarakat dapat mempengaruhi pola kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Hal ini karena kegiatan pembangunan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi mata pencaharian, tingkat kesejahteraan, serta pola hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat pula sebagian masyarakat yang melihat keberadaan perusahaan sebagai peluang untuk memperoleh pekerjaan. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa adanya aktivitas perusahaan membuka kesempatan kerja meskipun jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak semua masyarakat dapat terlibat secara langsung. Bagi sebagian masyarakat, kesempatan untuk bekerja di perusahaan dianggap sebagai tambahan sumber penghasilan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tidak selalu dipandang secara negatif oleh seluruh masyarakat.

Perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar dalam suatu proses pembangunan, terutama ketika kegiatan pembangunan tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat lokal. Sebagian masyarakat lebih merasakan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka, sementara sebagian lainnya melihat adanya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan dapat menimbulkan dinamika sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

## **Tindakan Yang Diambil Masyarakat Adat Pargamanan Bintang Maria Untuk Mendorong Pemerintah/Desa Menangani Dampak Lingkungan Dari Operasi PT TPL**

Masyarakat adat Pargamanan–Bintang Maria melakukan berbagai tindakan kolektif untuk mendorong pemerintah dan aparat desa agar lebih responsif dalam menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Salah satu tindakan utama yang dilakukan adalah memperjuangkan pengakuan hutan adat melalui pengajuan resmi kepada pemerintah, yang didukung oleh pemetaan partisipatif wilayah adat serta dukungan publik dalam bentuk petisi.

Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut secara lisan, tetapi juga menggunakan pendekatan administratif dan advokasi yang terstruktur. Sebagaimana disebutkan bahwa “puluhan ribu orang mendukung pengakuan hutan adat Pargamanan–Bintang Maria sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat” (KSPPM, 2022). Selain itu, masyarakat juga aktif melakukan advokasi dengan menyampaikan aspirasi melalui audiensi, surat resmi, dan aksi protes secara langsung kepada pemerintah.

Dalam proses ini, masyarakat mengangkat berbagai dampak yang mereka rasakan, seperti kerusakan hutan, penurunan kualitas lingkungan, serta berkurangnya sumber air, sebagai dasar tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin konsesi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan

bahwa “masyarakat adat terus menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah agar wilayah adat mereka diakui dan dilindungi dari ekspansi industri” (Mongabay, 2022).

Di tingkat lokal, masyarakat juga melakukan tindakan langsung berupa penolakan terhadap aktivitas perusahaan di lapangan, seperti menghalangi atau menghentikan kegiatan yang dianggap merusak lingkungan. Tindakan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus menekan pemerintah desa agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

Namun demikian, upaya tersebut seringkali dihadapkan pada keterbatasan kewenangan serta tekanan dari pihak luar, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara masyarakat dan perusahaan. Sebagaimana dijelaskan bahwa “masyarakat adat berupaya mempertahankan hutan mereka meskipun menghadapi tekanan dari aktivitas industri dan kebijakan negara” (Rainforest Action Network, 2022).

Selain aksi langsung, masyarakat juga membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil seperti KSPPM dan AMAN untuk memperkuat posisi mereka dalam advokasi kebijakan. Kolaborasi ini memungkinkan isu yang dihadapi masyarakat diangkat ke tingkat yang lebih luas, sehingga mendorong perhatian pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa “kolaborasi antara masyarakat adat dan organisasi pendamping menjadi strategi penting dalam memperjuangkan hak dan perlindungan lingkungan” (KSPPM, 2022). Dengan demikian, tindakan yang dilakukan masyarakat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berkelanjutan, mencerminkan adanya partisipasi aktif dalam mendorong pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam menangani dampak lingkungan yang terjadi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Hutan Tanam Industri di wilayah Pargamanan Bintang Maria, keterlibatan masyarakat adat masih dirasakan belum optimal. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan di wilayah mereka. Hal ini terlihat dari terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai rencana maupun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan tersebut. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa bahwa keberadaan perusahaan di wilayah mereka belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan kawasan hutan tersebut.

Padahal masyarakat adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kawasan hutan tersebut sejak lama. Bagi masyarakat adat, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat penting. Hutan menjadi tempat masyarakat menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, mulai dari mencari hasil hutan, mengelola tanaman kemenyan, hingga melaksanakan kegiatan adat tertentu. Oleh karena itu, keberadaan hutan memiliki makna yang lebih luas bagi masyarakat adat dibandingkan sekadar sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi.

Menurut konsep pengelolaan hutan yang dikemukakan oleh Hasanu Simon, pengelolaan hutan yang berkelanjutan seharusnya melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengelolaan tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan hutan serta memiliki pengetahuan lokal mengenai kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Pengetahuan lokal tersebut dapat menjadi salah satu sumber informasi yang penting dalam menjaga kelestarian hutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

Apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengelolaan hutan, maka dapat muncul perasaan tidak memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan. Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan pihak pengelola kawasan hutan. Masyarakat dapat merasa bahwa kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan kepentingan mereka sebagai pihak yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan hutan menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara lebih aktif, pengelolaan hutan diharapkan dapat berjalan secara lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari aktivitas pengelolaan hutan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa keberadaan aktivitas perusahaan berkaitan dengan persoalan pemanfaatan wilayah yang selama ini dianggap sebagai bagian dari wilayah adat masyarakat. Bagi masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria, hutan bukan hanya sekadar lahan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan kehidupan mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Hutan menjadi ruang hidup bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun budaya yang telah berlangsung sejak lama.

Perjuangan masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria dalam mempertahankan wilayah adat dan kelestarian hutan tidak hanya dilakukan di tingkat lokal, tetapi juga telah disuarakan hingga ke forum internasional yaitu di forum konferensi internasional tertentu, tetapi lebih melalui kampanye internasional dan advokasi global yang difasilitasi oleh organisasi lingkungan seperti Rainforest Action Network. Kampanye ini menargetkan perusahaan global seperti Procter & Gamble yang menjadi bagian dari rantai pasok pulp dari grup Royal Golden Eagle (RGE), yang juga terkait dengan operasi PT Toba Pulp Lestari.

Hal ini terlihat dari pernyataan Rajes Sitanggung selaku pemimpin adat Raja Huta dan Kepala Komunitas Pargamanan–Bintang Maria yang menyampaikan bahwa “masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarkan dampak lingkungan dan sosial yang mereka alami akibat aktivitas perusahaan. Masyarakat adat Batak telah melakukan perjalanan panjang untuk menyampaikan protes terhadap kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi selama lebih dari satu decade”. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan secara simbolis, tetapi juga untuk memperjuangkan perlindungan terhadap wilayah adat mereka dari aktivitas industri yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis dampak lingkungan operasi PT Toba Pulp Lestari di wilayah Hutan Tanam Industri masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perusahaan telah membawa perubahan terhadap kondisi lingkungan di wilayah tersebut. Perubahan yang dirasakan masyarakat antara lain berkurangnya tutupan hutan alam, perubahan kondisi tanah, serta menurunnya ketersediaan sumber air di beberapa titik yang sebelumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan hutan tanaman industri memiliki pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan di wilayah adat tersebut. Selain dampak terhadap lingkungan, keberadaan perusahaan juga memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat adat. Sebagian masyarakat merasakan adanya dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Namun di sisi lain, masyarakat juga menyadari bahwa keberadaan perusahaan dapat memberikan peluang tertentu seperti kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan bersifat kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi pemerintah desa dan tokoh masyarakat, terdapat harapan agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Komunikasi dan keterbukaan antara perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah desa dinilai menjadi hal yang penting untuk meminimalkan konflik serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan perusahaan diharapkan dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dinamika yang terjadi di wilayah masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi antara tiga aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu masyarakat sipil, negara, dan pasar. Dalam konteks ini, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria merepresentasikan masyarakat sipil yang secara langsung merasakan dampak dari aktivitas pemanfaatan hutan. Sementara itu, pemerintah desa sebagai bagian dari struktur negara memiliki peran dalam mengatur, memediasi, serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak perusahaan. Di sisi lain, PT Toba Pulp Lestari sebagai pelaku pasar menjalankan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan hutan tanaman industri yang memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Interaksi antara ketiga aktor tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini memerlukan keseimbangan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud apabila terdapat komunikasi, kerja sama, dan kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Aldo Maruli Tua Sianturi, Bestian Simangunsong, Tiffany Tamba, Bernhardt Siburian, & Nurelmi Limbong. (2024). Analisis Dampak Penebangan Hutan Adat Kemenyan di Pandumaan, Humbang Hasundutan: Sebuah Pendekatan Restorasi Ekologi. *Konstanta: Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan*
- Alfian, A., Kudussisara, K., Maimunah, N. S., & Susana, I. (2025). Masyarakat Adat dan Toba PULP Lestari: Pemetaan Aktor dan Analisis Konflik Agraria.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Boston: Pearson Education.
- Fitzmaurice, M. (2015). The 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. *Austrian Review of International and European Law*, 17(1), 139–265. <https://doi.org/10.1163/15736512-90000006a>
- Harsono Boedi. (2013). Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undangundang pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya. Juniatmoko, R., Arifien, Y., Siahaya, A. N., Herniwanti, A. F., Kurnianingsih, O., & Bagenda, C. (2023). Analisis Mengenai Dampa Lingkungan (AMDAL).
- Kartodihardjo, H., & Supriono, A. (2000). Dampak Pembangunan Sektoral Terhadap Konversi Dan Degradasi Hutan Alam. *Center for International Forestry Research*, 26(1), 1–14. <https://agris.fao.org/agrissearch/search.do?recordID=US201300098127> Skripsi:
- Lumbanraja, F. D. N. (n.d.). Proses Sewa Menyewa Lahan Kemenyan Petani Desa Huta Paung dalam Mitra Kerja Terhadap PT. TPL (Studi Kasus Tombak Simonggo).
- Siagian, R. (2025). masyarakat adat pargamanan. MONGABAY.
- Sidabalok, Y. E., Muliono, & Pratama, G. (2024). Analisis dampak konflik lahan terhadap masyarakat adat Sihaporas dalam perspektif ekologi politik: Studi kasus PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pematang Sidamanik. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*.
- Sihombing, Y. P. (2024). Dampak Perkebunan Pt.Toba Pulp Lestari Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Manaludolok Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Simon, H. (2004). *Membangun Kembali Hutan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinurat, L. P. (2019). Hak Atas Tanah Adat: Gerakan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Selama Era Reformasi Customary Land Right: the Indigenous Peoples of Pandumaan-Sipituhuta Movement“S During Reformation Era. *Al-Qalam*, 485–498.
- Situmorang, A. (2024). Konflik agraria tanah ulayat masyarakat Desa Lumban Sitorus dengan PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.);

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

cetakan 3).

Situmorang, S. (2020). Studi Dampak Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sihas Dolok I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Soemarwoto, O. (2004). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan